

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ialah sebuah lembaga keuangan non bank yang dasar hukumnya berbeda dengan bank. LPD adalah suatu badan perekonomian desa di mana berfungsi sebagai suatu wadah penyimpanan dana, penyaluran kredit, serta sumber pendanaan dalam rangka suatu pembangunan desa yang ada di Bali (Paramitha & Dharmadiaksa, 2019). LPD menyediakan dana untuk operasional serta dalam rangka mencapai tujuan memberikan manfaat kepada warga desa adat. Lembaga Perkreditan Desa yang biasa disebut dengan LPD sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang mencerminkan adanya komunitas pada masyarakat berdasarkan atas prinsip hukum adat di Bali. Lembaga keuangan mikro tersebut memiliki karakter yang sangat khas karena sebagai lembaga komunitas yang tercipta dan didirikan untuk masyarakat yang ada di desa pakraman (Putri *et al.*, 2018).

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang merupakan lembaga keuangan milik komunitas adat diatur secara mandiri oleh Peraturan Daerah artinya tidak diatur oleh pemerintah seperti otoritas jasa keuangan lainnya (Astrayani, 2017). Manajemen LPD sama halnya dengan pemerintahan Desa Adat, yakni atas dasar prinsip kekeluargaan dan pelayanan jasa keuangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling percaya (Paramitha & Dharmadiaksa, 2019). Pengurus dari LPD itu sendiri ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah Desa Adat. Pengurus

LPD merupakan warga yang berasal dari tiap Banjar yang berada dalam satu Desa Adat dan memiliki Badan Pengawas LPD Desa Adat yang terdiri dari seluruh Kelian Banjar di Desa Adat yang bersangkutan. Menilai kinerja dari suatu LPD diperlukan laporan keuangan yang baik dan lengkap. Keberhasilan manajemen dalam mengelola suatu entitas atau organisasi dapat tercermin dari laporan keuangan yang dihasilkan. Menurut Kordlouie, *et. al* (2014) tujuan utama dibuatnya laporan keuangan adalah untuk menggambarkan kinerja dari suatu perusahaan bisnis dalam membantu *stakeholders* membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan yang berkualitas baik memiliki empat karakteristik yaitu, relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Terdapat berbagai faktor dalam penelitian ini yang mempengaruhi dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah etika kepemimpinan. Etika adalah nilai moral yang menjadi acuan manusia secara individu maupun kelompok dalam mengatur segala tingkah lakunya. Kepemimpinan yang didefinisikan oleh Wibowo (2011) merupakan suatu proses pengaruh antara orang. Proses tersebut bertujuan memotivasi bawahan, mencapai visi masa depan, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Etika dalam kepemimpinan dikaitkan tentang bagaimana pemimpin dapat memimpin pengikutnya dengan tetap mengindahkan kaidah, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Astrayani (2017) Meneliti tentang etika kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitiannya bahwa

etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Andika (2017) juga melakukan penelitian yang sama dan hasil penelitiannya etika kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nudilah (2016) juga melakukan penelitian sejenis, namun hasil penelitiannya berbeda yaitu etika kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah tingkat Pendidikan. Suatu pendidikan pada dasarnya adalah suatu proses pengembangan sumber daya manusia. Henry Simamora (1999: 287) menyatakan: “Pendidikan ialah penyiapan individu-individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi di dalam organisasi. Biasanya peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik”, dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pegawai yang mempunyai tugas di bagian keuangan akan merasa lebih mudah memahami pekerjaannya Menyusun laporan keuangan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Setiadi & Devi (2020), menunjukkan kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh tingkat pendidikan. Sedangkan hasil penelitian Budiono, dkk (2018) menyatakan kualitas laporan keuangan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat Pendidikan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah fungsi badan pengawas. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa

semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Berdasarkan penelitian Putra dan Gunadi (2017) dan penelitian yang dilakukan Yenita (2010) menyatakan bahwa fungsi badan pengawas internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sukirman & Nurhasan (2013) berpendapat bahwa dukungan badan pengawas internal berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah tingkat pemahaman akuntansi. Tingkat pemahaman akuntansi sangatlah diperlukan dalam membuat atau menyusun suatu laporan keuangan. Adanya tingkat pemahaman akuntansi yang tinggi maka akan terhindar dari adanya kesalahan-kesalahan informasi yang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pemahaman dalam akuntansi. Wibawa (2017), Kiranayanati (2016), Priyatna (2015), Diani (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.. Nova (2015) juga melakukan penelitian sejenis dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor kelima yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah tingkat pengalaman kerja. Setiap orang yang memiliki pengalaman yang luas akan lebih mudah berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaannya baik di organisasi, perusahaan, maupun juga di pemerintahan. Semakin lama karyawan bekerja dalam bidang di organisasi, maka akan semakin berpengalaman karyawan tersebut dalam

menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muzahid (2014), yang menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian di atas didukung oleh beberapa penelitian lainnya antara lain Harahap (2016), Marlina (2017), Wardani (2014), dan Nurhayati (2017) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan Laporan Kesehatan LPD Periode September 2021, LPD di Kecamatan Kediri berjumlah 21 dengan 9 LPD dinyatakan sehat, 3 LPD cukup sehat, 7 LPD kurang sehat dan 2 dinyatakan tidak sehat. Adanya kondisi-kondisi tersebut dikarenakan dalam pengembangan Lembaga Perkreditan Desa yang tak luput dari permasalahan diantaranya yaitu, kesenjangan tingkat pertumbuhan LPD yang meningkat dengan total aset LPD yang relatif kecil, penyampaian laporan yang tidak tepat waktu yang mana akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi LPD setempat, adanya LPD yang tidak menggunakan sistem akuntansi dalam menunjang aktivitasnya, adanya LPD yang belum memenuhi rasio kecukupan modal dan melampaui batas maksimum pemberian kredit.

Permasalahan tersebut juga akan memicu dalam penyalahgunaan dana nasabah. Salah satunya yang terjadi di LPD Cepaka yang terdapat di Kecamatan Kediri. Dalam hal ini dana nasabah di gunakan oleh seorang oknum pengurus LPD. Kasus ini terungkap saat nasabah hendak menarik uang mereka tetapi tidak bisa dicairkan. Berdasarkan dari ketentuan laporan neraca keuangan kondisi LPD sehat, sirkulasi keuangan berjalan normal. Tetapi setelah didalami kas fisik LPD tidak ada, yang artinya LPD secara laporan sehat tetapi riilnya uang tunai yang berada di kas

tidak ada sehingga kondisi LPD dapat dikatakan tidak sehat. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Kediri Tabanan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah etika kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah fungsi badan pengawas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah tingkat pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

UNMAS DENPASAR

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh etika kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan
3. Untuk mengetahui pengaruh fungsi badan pengawas terhadap kualitas laporan keuangan.

4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan mahasiswa dalam mengaplikasikan teori yang telah dipelajari serta membandingkan dengan kondisi sebenarnya di perusahaan khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Kediri Tabanan.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan tempat untuk mempraktekkan teori yang telah dipelajari selama kuliah dan menerapkan pada masalah sesungguhnya yang terjadi, serta dapat menambah wawasan tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

b. Bagi LPD se-Kecamatan Kediri

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi LPD di Kecamatan Kediri untuk meningkatkan kualitas tentang laporan keuangan yang dihasilkan.

c. Bagi Fakultas Atau Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada LPD di Kecamatan Kediri dan menjadi sumbangan koleksi perpustakaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kelembagaan Lama (*Old-institutional theory*)

Pengertian kelembagaan atau institution dalam ilmu ekonomi adalah aturan hidup, organisasi, kepercayaan dan norma dalam kelompok manusia. Aturan hidup, organisasi, atau norma merupakan bentukan turun temurun, generasi-ke generasi (secara historis). Ekonomi kelembagaan memberi porsi penghargaan terhadap pemikiran historis sebagai rujukan gagasan kelembagaan (North, 1990). Teori kelembagaan atau insttutional theory dapat didefinisikan Rinaldi dalam Widyawati,(2012) sebagai teori yang menjelaskan tentang bagaimana suatu perusahaan berkembang dan bertahan ketika berada dalam lingkungan yang kompetitif yang penuh dengan para pesaing, serta mempelajari bagaimana cara perusahaan untuk memuaskan *stakeholder*. Di dalam suatu perusahaan khususnya LPD mempunyai badan pengawas yang bertugas untuk meningkatkan kinerja LPD dan mensosialisasikan keberadaan LPD agar tetap masih bisa bertahan dan berkembang di kalangan masyarakat. Pengawas internal adalah pihak yang membantu perusahaan untuk memastikan bahwa pengendalian internal pada laporan keuangan berjalan secara efektif tanpa terdapat kecurangan sehingga dapat diperoleh laporan keuangan yang berkualitas dan akurat. Terdapat dua teori yang berkaitan dengan teori kelembagaan ini yaitu teori kelembagaan lama (*old institutional theory*) dan teori kelembagaan baru (*new institutional theory*).

Di dalam teori kelembagaan lama (Widyawati, 2012) mempercayai bahwa masyarakat mengidentifikasi suatu organisasi berdasar norma dan nilai yang dianut organisasi tersebut. *Old institutional theory* digunakan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi dan berlangsung dalam waktu yang lama dalam suatu organisasi. (Selznick dalam Widyawati 2012) juga mendefinisikan institusionalisasi, yaitu proses dimana suatu norma dan nilai sosial tersebut dikenalkan dan diadopsi kedalam suatu sistem organisasi. objek analisis dalam teori kelembagaan lama adalah individu sedangkan pada teori kelembagaan baru obyek analisisnya adalah organisasi. Sehingga penelitian ini menggunakan *Old Institutional Theory* karena yang diteliti adalah karakter orang-orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan yaitu etika yang dimiliki pemimpin, kemudian fungsi anggota badan pengawas dalam melakukan tugasnya serta pemahaman akuntansi dari karyawan yang membuat laporan keuangan itu sendiri.

2.1.2 Kualitas Laporan keuangan

Laporan keuangan meliputi bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian *integral* dari laporan keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (2009). Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi, di mana nantinya dijadikan sebagai sumber informasi dalam menilai kinerja suatu organisasi (Anggayana & Wirajaya, 2019). Kualitas laporan keuangan suatu perusahaan dapat

dilihat dari seberapa besar informasi yang disajikan bisa bermanfaat serta bagaimana perusahaan dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan kerangka konseptual serta prinsip dasar serta tujuan akuntansi. Dalam Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2012). Karakteristik kualitatif pokok ada empat yaitu sebagai berikut: relevan, andal, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan. Laporan keuangan adalah kegiatan akuntansi yang bermanfaat dalam mengkomunikasikan data keuangan berupa angka-angka dari sebuah organisasi perusahaan untuk pihak yang bekerja sama dengan kepentingan perusahaan. Kualitas laporan keuangan merupakan bentuk penilaian laporan akuntansi yang dapat menjamah dan dipahami setiap pihak yang berkepentingan dengan penyampaian keuangan dan hasil usaha sesuai prinsip akuntansi yang berlaku (Widiastoeti & Sari, 2020). Lestari & Dewi (2020) menambahkan, laporan keuangan adalah laporan dengan struktur yang telah ditentukan berisi laporan dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu bidang dalam sebuah perusahaan. Laporan keuangan dilakukan oleh instansi dan merupakan bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan dalam periode tertentu. Kualitas laporan keuangan ditunjukkan dengan melalui keterlaksanaan anggaran belanja, dan karakteristik kualitatif.

Laporan keuangan dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 sebagai laporan terstruktur posisi keuangan beserta transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan sajian data informasi yang meliputi pembahasan keuangan, pelaksanaan anggaran, saldo yang dimiliki, kas pada periode tertentu, dan operasional serta hasil yang dilaksanakan menggunakan uang perusahaan. Kualitas laporan keuangan yang baik adalah jika laporan tersebut

dapat menyajikan perubahan (meningkat dan menurun), penggunaan anggaran yang jelas, serta dapat dievaluasi oleh pihak yang berwenang (Defitri, 2018).

Laporan keuangan mempunyai karakteristik yang berguna bagi pemakai. Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2015) yakni:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi

yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (*confirmatory role*) terhadap prediksi yang lalu, misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan kalau pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam

neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya, suatu perusahaan mungkin menjual suatu aset kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut; namun demikian, mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aset. Dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat (jika sesungguhnya memang ada transaksi).

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

d. Pertimbangan Sehat

Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal.

e. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak

mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*tren*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan cara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda

2.1.3 Etika Kepemimpinan

Menurut Frisch dan Huppenbauer, (2014) etika kepemimpinan adalah petunjuk atau kaidah yang mengatur sikap dan perilaku karyawan ketika bekerja di dalam perusahaan. Kepemimpinan seorang pemimpin yang memiliki etika akan mampu membawa organisasi yang dipimpinnya sampai ke puncak keberhasilan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada pada semua anggota organisasi yang dipimpin. Seorang pemimpin menjadikan etika sebagai dasar mengoptimalkan semua bakat dan potensi sumber daya manusia, dan meningkatkan nilai dari semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi serta menghargai semua kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Seorang pemimpin tidak boleh menciptakan jarak antara mimpi dan realitas, tetapi seorang pemimpin yang beretika membantu semua mimpi pengikutnya menjadi kenyataan. Pemimpin yang beretika tidak akan

pernah punya niat untuk menyingkirkan bakat-bakat hebat yang menjanjikan masa depan cerah. Seorang pemimpin akan mengilhami semua orang dengan motivasi dan keteladanan untuk mampu mencapai keunggulan, dan merangsang semua orang untuk berfikir positif dan bekerja efektif. Etika kepemimpinan dapat terwujud jika pemimpin memiliki sifat jujur kepada pengikutnya, pemimpin dapat dipercaya oleh para pengikutnya sehingga pengikutnya akan merasa aman di dekat si pemimpin, memiliki hubungan yang positif terhadap pengikutnya, dapat menilai dan memahami kinerja para pengikutnya, dapat bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dibebankan dengan cara menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, memiliki sifat adil, kritis, rendah hati, dan hormat kepada diri sendiri dan orang lain.

2.1.4 Tingkat Pendidikan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tingkat pendidikan atau sering disebut dengan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan dapat menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. menurut Heidjrachman (dalam Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, 2008: 134) pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang, termasuk di dalamnya peningkatan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan dalam

mencapai suatu tujuan. Dan menurut Siagian (dalam Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, 2008: 134), pengertian pendidikan adalah keseluruhan proses, teknik dan metode belajar mengajar dalam rangka mengalihkan suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Suatu pendidikan pada dasarnya adalah suatu proses pengembangan sumber daya manusia. Henry Simamora (1999: 287) menyatakan: “Pendidikan ialah penyiapan individu-individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi di dalam organisasi. Biasanya peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik”, dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pegawai yang mempunyai tugas di bagian keuangan akan merasa lebih mudah memahami pekerjaannya Menyusun laporan keuangan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Setiadi & Devi (2020), menunjukkan kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh tingkat pendidikan. Sedangkan hasil penelitian Budiono., dkk (2018) menyatakan kualitas laporan keuangan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pendidikan.

2.1.5 Fungsi Badan Pengawas

Menurut Peraturan Gubernur Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Pengurus dan Pengawas intern LPD pasal 10, menyatakan bawah yang bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawas intern LPD adalah Badan Pengawas LPD. Pembentukan badan pengawas pada LPD diatur dalam keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali Nomor 491 Tahun 1998 tentang Ketentuan Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Provinsi Daerah TK 1 Bali. Menurut Suartana (2010) peran badan

pengawas internal secara aktif mengawasi kebijakan, operasional, praktik akuntansi, pelaporan keuangan dan menjadi penghubung antar pengelola dengan auditor eksternal bila diperlukan. Widiantariati (2019) Meneliti tentang fungsi badan pengawas terhadap kualitas laporan, hasil penelitiannya bahwa fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Peranan badan pengawas internal sebagai pengawas internal sangat strategis, di samping sebagai auditor internal juga sebagai partner yang bersinergi untuk memajukan LPD. Peran badan pengawas intern dalam mengawasi operasional LPD bisa dilakukan oleh siapa saja di desa pekraman bersangkutan tanpa mengenal jenjang dan jenis pendidikan. Semakin besar aset LPD maka ruang lingkup pengawasan menjadi semakin luas dan kompleks. Mengingat pentingnya peranan badan pengawas intern, maka ia harus memiliki kejelasan dalam struktur organisasi yang ada, keahlian teknis, dan pola pikir yang membuat mampu menjalankan tata kelola, bimbingan, dan tanggung jawab (Wedayani dan Jati,2013). Sesuai dengan pasal 1 ayat (11) Perda No.3 tahun 2007, yang dimaksud pengawasan internal adalah badan pengawas yang dibentuk oleh desa dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPD. Divisi audit pada LPD adalah badan pengawas internal yang sering disebut dengan Badan Pengawas Desa yang secara kelembagaan harus memahami seluruh elemen pengendalian yang terdiri dari evaluasi pengelolaan risiko, evaluasi pengendalian, dan evaluasi proses *governance*.

Menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 491 Tahun 1998 mengenai Pembentukan dan Kedudukan Badan Pengawas adalah sebagai berikut, di tiap-tiap LPD dibentuk badan pengawas LPD, 1) Badan

pengawas terdiri dari seorang ketua dan sebanyak - banyaknya 2 orang anggota 2) Bendesa adat sebagai ketua badan pengawas 3) Ketua dan anggota badan pengawas tidak dibenarkan merangkap sebagai badan pengurus LPD Tugas dari badan pengawas LPD adalah: 1) Mensosialisasikan keberadaan LPD 2) Memotivasi dan meningkatkan kinerja LPD 3) Mengawasi proses penyaluran kredit dan penanganan kredit macet atau bermasalah Seorang pengawas LPD memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 1) Bertanggung jawab terlaksananya rencana program bidang pengawasan 2) Bertanggung jawab terhadap peningkatan kinerja personalia bidang pengawasan. 3) Bertanggung jawab berkembangnya aset yang dimiliki oleh LPD. 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan standar operasional dan prosedur bidang pengawasan 5) Bertanggung Jawab terhadap seluruh kegiatan operasional bidang pengawasan.

2.1.6 Tingkat Pemahaman Akuntansi

Tingkat pemahaman akuntansi sangatlah diperlukan dalam membuat atau Menyusun suatu laporan keuangan. Adanya tingkat pemahaman akuntansi yang tinggi maka akan terhindar dari adanya kesalahan-kesalahan informasi yang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pemahaman dalam akuntansi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, pengintrepretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Paham menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta : 2006) mempunyai

pengertian pandai dan mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemahaman akuntansi berhubungan erat dengan standar akuntansi karena dalam menjalankan proses akuntansi, seorang akuntan harus mengikuti standar yang berlaku. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah metode dan format baku dalam penyajian laporan keuangan suatu entitas. Terdapat 5 standar akuntansi keuangan yang terdapat di Indonesia, yaitu: 1) Standar Akuntansi Keuangan - International Financial Report Standard (SAK-IFRS), 2) Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), 3) SAK-Syariah, dan 4) Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK-EMKM) (Andriana, 2021).

Selama ini standar akuntansi yang digunakan LPD adalah standar akuntansi keuangan umum yang berlaku, namun mengingat LPD adalah sebuah lembaga keuangan yang bersifat khusus yaitu lembaga keuangan milik komunitas adat Bali. Apalagi setelah keluarnya UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, semakin jelas perbedaan LPD dengan bank atau koperasi dari sisi karakternya, maka idealnya LPD harus memiliki suatu standar mencerminkan

keunikannya (Kustina, 2014). Banyak wacana yang menyatakan bahwa LPD tepat menggunakan SAK ETAP (Rahayu dkk, 2016).

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun (IAI, 2016).

2.1.7 Pengalaman Kerja

Pengalaman adalah suatu proses pembelajaran yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih baik. Purnamasari (2005:3) dalam Dewi, (2018:12) menyimpulkan seorang pekerja yang memiliki banyak pengalaman akan mempunyai keunggulan dalam mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan, serta mencari penyebab munculnya kesalahan.

Pengalaman kerja merupakan lama kerja pengawas intern pada perusahaan. Semakin lama seorang pengawas intern bekerja pada perusahaan tersebut maka akan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya dalam melakukan

tugas audit (Sari dan Susanto, 2018). Pengalaman kerja sangat dibutuhkan dalam setiap pekerjaan. Pengalaman kerja akan memberikan kita petunjuk dan pembelajaran tentang bagaimana cara mengatasi setiap permasalahan yang ada. Memiliki pengalaman kerja yang lebih banyak, seseorang pekerja lebih dapat menguasai dan mengerti dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Menurut penelitian dari Muzahid, dkk (2019), Marlina., dkk (2018) menunjukkan kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengalaman kerja.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astari (2018), tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada LPD Di Kota Denpasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas tidak berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan LPD di kota Denpasar, sedangkan tingkat pemahaman akuntansi menunjukkan pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan di LPD kota Denpasar.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agus Sinaranata(2019), Tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas Dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada LPD Di Kecamatan Penebel”. Hasil penelitian etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi menunjukkan pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan di LPD Kecamatan Penebel.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febriantini (2020), tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada LPD Di Kota Denpasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan di LPD Kota Denpasar.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi (2019), menunjukkan bahwa Tingkat Pemahaman Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas Internal, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan, sedangkan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratiwi (2021) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Marga sedangkan profesionalisme dan etika kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Marga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh astrayani (2017) tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas Dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Abiansemal”. Hasil penelitian menyatakan bahwa fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan lembaga perkreditan desa di Kecamatan Abiansemal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh mastri (2018) tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan Fungsi Badan Pengawas , Dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Sukawati”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan etika kepemimpinan dan fungsi badan pengawas berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh yanti (2018) tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi , Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kota Denpasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika kepemimpinan, kualitas sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh krisnawati (2019) tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Profesionalisme, Fungsi Badan Pengawas Dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Badung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika kepemimpinan dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan profesionalisme dan fungsi badan pengawas berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Julia (2020) tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas, Pengalaman Kerja Dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kota Denpasar”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa etika kepemimpinan dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan fungsi badan pengawas dan pengalaman kerja tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pramesti (2020) tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas, Pendidikan, Pengalaman Kerja Dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Mengwi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan, pengalaman kerja dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan fungsi badan pengawas, etika kepemimpinan tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh yuda (2022) tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Pendidikan, Fungsi Badan Pengawas, Sistem Pengendalian Internal, Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan”. Hasil penelitian menunjukkan etika kepemimpinan, Pendidikan, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh maulana (2017) tentang “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan

Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahya (2022) tentang “Pengaruh Fungsi Badan Pengawas, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Pengalaman Kerja Dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kota Denpasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan kualitas sistem informasi akuntansi, pengalaman kerja, dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tika (2022) tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Blahbatuh”. Kualitas sistem informasi akuntansi, tingkat pemahaman akuntansi dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan sedangkan etika kepemimpinan dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.